

permasalahan, yaitu kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal analisis diarahkan kepada tepat atau tidaknya kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melihat kembali pembagian tugas, fungsi dan wewenang dari Aparat Penegak Hukum (APH) lain yang ada di Indonesia.

Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengolah data yang telah dikumpulkan adalah dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang bersifat khusus. Artinya, mengemukakan teori yang bersifat umum, yaitu teori *wilāyah al-mazālim* kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing

bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang akan diteliti.

Bab I sebagai pendahuluan berupa uraian latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori tentang konsep *wilāyah al-mazālim* yang meliputi: pengertian *wilāyah al-mazālim*, dasar hukum *wilāyah al-mazālim*, sejarah *wilāyah al-mazālim* dan tugas dan fungsi *wilāyah al-mazālim*.

Bab III berisi data tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini meliputi pengertian kewenangan KPK, dasar hukum kewenangan KPK, dan mekanisme pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK dalam penanganan kasus korupsi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Bab IV merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini, yaitu analisis terkait kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan analisis Fikih Siyasah terhadap kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

